

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

Vol. 9, No.1, Juni 2023

ISSN: 2476-9320

E-ISSN: 2775-068X

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-9320

E-ISSN: 2775-068X

Vol. 9, No. 1 Juni 2023

- Pembina** : Dr. H. Sapriillah, S.Ag.,M.Si.
- Pimpinan Redaksi** : Nasrun Karami Alboneh, S.Ag.
- Sekretaris Redaksi** : Nursaripati Risca, S.Pd
- Dewan Redaksi** : Dr. Andi Isra Rani, S.Si., S.Pd., M.T.
Zakiah, SE., Ak
Surya Rahmah Labetubun, S.Kom
- Redaktur Ahli** : Paisal, S.H.
Amir Alboneh, S.Ag
Muhammad Afhan, SE
Dr. Syamsurijal, S.Ag., M.Si
Muhammad Irfan Syuhudi, S.Sos., M.Si
- Mitra Bestari** : Prof. Dr. H. Abd. Kadir Ahmad MS.
Dr. H. Norman Said, M.Ag
Dr. Abdul Muhaimin, M.Ed
Dr. H. Barsihan Noor
Dr. Wahyudin Halim
Sitti Arafah, S.Ag., M.A.
- Sekretariat** : Nasri, S.Sos
Husnul, S.Pd
Burhanuddin
Bohari
- Layout** : M. Zulfikar Kadir, S.H.
- Alamat Redaksi** : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar 90222
Telp. 0411- 452952 Fax 0411-452982
Email:jurnalmimikri@gmail.com

“Mimikri” Jurnal Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima tulisan mengenai agama dan kebudayaan, baik berupa artikel hasil penelitian, kajian non penelitian, dan resensi buku. Panjang tulisan 15-20 halaman, A4, 1,5 sparis, font Times New Roman, 12, margin 3 cm, pengutipan acuan dalam tubuh tulisan menggunakan (*innote*) dengan urutan nama penulis, tahun terbit, dan halaman, seperti (Sapriillah, 2019: 12), diserahkan dalam format *print out* dan file dalam format Microsoft Word. Biodata penulis dapat dikirimkan melalui e-mail: petunjuk lengkap penulisan terdapat pada bagian belakang jurnal ini.

DAFTAR ISI

AHMAD BASO

**SATU ABAD NAHDLATUL ULAMA, SATU ABAD PENGHADIRAN WALI
SONGO: MELACAK AKAR-AKAR PEMIKIRAN KEISLAMAN-KEBANGSAAN
NAHDLATUL ULAMA**

Halaman: 1 -18

ABD. KADIR AHMAD

**AWAL KEBERADAAN NU SULSEL: TRADISI *APPALEMBA KITTAK* DAN PROFIL
PENGURUS MAJELIS KONSUL NU**

Halaman: 19 - 32

SYAMSURIJAL

**MENGINTIP NAHDLATUL ULAMA (NU) DARI TIMUR:
KHITTAH NU DALAM PANDANGAN DAN PENGALAMAN NAHDLIYIN
DI SULAWESI SELATAN**

Halaman: 33 - 53

MUHAMMAD ALWI HS

**KOMBINASI PERAN ULAMA-UMARA DALAM DAKWAH AGH. SANUSI BACO
DALAM PENGUATAN MODERASI BERAGAMA BERBASIS NAHDLATUL
ULAMA DI INDONESIA TIMUR**

Halaman: 54 - 70

WENDI PURWANTO

**PENAFSIRAN KESETARAAN GENDER PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL
ULAMA: ABDUL SOMAD, BAHAUDDIN NURSALIM DAN IDRUS RAMLI
DALAM TAFSIR VERBAL DI MEDIA SOSIAL**

Halaman: 71 - 88

SABARA

PERAN NU SEBAGAI AGEN PERDAMAIAN DI PAPUA

Halaman: 89 - 106

MURSALAT

**NAHDLATUL ULAMA (NU) FEMALE FIGURES IN THE MODERN ERA:
YENNY WAHID'S GAIT AS A WOMAN WARRIOR IN HUMANITY AND PEACE**

Halaman: 107 - 121

MUHAMMAD SURYADI

**NAHDLATUL ULAMA DAN ISU LINGKUNGAN
(KOMITMEN NU MEWUJUDKAN KEADILAN EKOLOGI DAN
SUMBER DAYA ALAM)**

Halaman: 122 - 134

MUHAMMAD IRFAN SYUHUDI
MENEMUKAN KEBERAGAMAN AGAMA MELALUI PENGALAMAN
BERINTERAKSI DENGAN ANAK-ANAK MUDA NAHDLIYIN
DI MAKASSAR

Halaman: 135 - 149

MUH. SUBAIR
RESISTENSI WARGA NAHDLATUL ULAMA (NU)
TERHADAP WAHABI TAKFIRI

Halaman: 150 - 167

SISWOYO ARIS MUNANDAR
PERAN DAN KONTRIBUSI K.H. YAHYA CHOLIL STAQUF DALAM
PEMBANGUNAN ISLAM MODERAT DI INDONESIA DAN DI DUNIA
INTERNASIONAL

Halaman: 168 - 185

ANI KURNIAWATI
KIAI HASYIM ASY'ARI : PERJUANGAN MELAWAN PENJAJAH BELANDA

Halaman: 186 - 191

IMAM GHOZALI, IMAM HAKIM DAN NAIF ADNAN
KONSEP *SUMELEH* ABDURRAHMAN WAHID DALAM MENGEMBANGKAN
NILAI-NILAI KE-NU-AN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEMAJEMUKAN
MASYARAKAT

Halaman: 192 - 203

ISRAPIL DAN SYAMSURIAH
PEMETAAN MASJID DI KOTA MAKASSAR :
POTENSI DAN PELUANG LTM NU DALAM MEMAKMURKAN
MASJID DI MAKASSAR

Halaman: 204 – 213

HENRI HERMAWAN ADINUGRAHA
NAHDLATUL ULAMA UNIVERSITY IN INDONESIA: ITS ROLE AND CONCRETE
CONTRIBUTION TOWARD CURRENT EDUCATION

Halaman: 214 - 233

PERAN NU SEBAGAI AGEN PERDAMAIAN DI PAPUA

Sabara

Pusat Riset Agama dan Kepercayaan Badan Riset dan Inovasi Nasional

Email: barackfilsafat@yahoo.co.id

Abstrak

Papua adalah salah satu daerah dengan tingkat kerentanan konflik yang cukup tinggi di Indonesia. Isu separatisme hingga agama menjadi isu yang memantik kerentanan tersebut. Peran organisasi masyarakat tentu menjadi sangat penting sebagai agen sosial dalam menjaga perdamaian di Papua. Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu ormas yang banyak berkecimpung dalam upaya membangun perdamaian di Papua dengan mengusung misi dan wajah Islam damai. Tulisan ini mengelaborasi peran-peran sosial NU tersebut sebagai agen perdamaian di Papua dalam meminimalisir kerentanan konflik, peran dalam rekonsiliasi dan restorasi pasca konflik dan peran-peran sebagai agen perdamaian dalam mewujudkan Papua sebagai tanah damai. Tulisan ini merupakan hasil dari serangkaian riset panjang tentang keagamaan, kerukunan dan konflik yang pernah peneliti lakukan sepanjang 2012-2022 di Papua. Temuan tulisan ini mengonfirmasi peran-peran strategis Pengurus Wilayah (PW) NU Papua melalui tokoh-tokohnya dalam upaya mewujudkan perdamaian dan rekonsiliasi konflik, khususnya yang berkenaan dengan konflik yang bernuansa agama. Tokoh NU berperan penting sebagai *social bridging* yang menjembatani antar elemen umat beragama yang ada di Papua, sehingga terjalin komunikasi yang baik dan terwujud kerukunan antar umat beragama. Dalam kasus konflik bernuansa agama seperti kasus Tolikara, Wamena, Koya dan Sentani, tokoh PWNU Papua berperan penting dalam memberikan pertimbangan informasi yang meredam munculnya konflik dalam skala yang lebih luas. Peran strategis dan kontribusi NU di Papua sebagai agen perdamaian, tak lepas dari warisan sosok Gus Dur yang diterima sebagai tokoh yang banyak berjasa oleh masyarakat Papua.

Kata Kunci: *NU Papua, papua tanah damai, perdamaian, konflik*

PENDAHULUAN

Kondisi sosial, situasi politik, faktor ekonomi hingga problem pengelolaan keragaman membuat Papua menjadi salah satu daerah dengan tingkat kerentanan konflik yang cukup tinggi di Indonesia. Kerentanan konflik tersebut kerap merembet dan membawa isu agama, sebagai variabel yang paling sensitif dalam memicu konflik. Banyak persoalan di berbagai aspek kehidupan masyarakat yang kapan saja dapat memantik timbulnya gejolak konflik sosial (Waimbo dan Yuwono 2012). Hubungan harmonis antarumat beragama menjadi pertarungan, di samping persoalan yang lebih luas menyangkut integrasi Papua sebagai bagian dari wilayah dan kedaulatan NKRI. Agama sebagai variabel tak dapat dikesampingkan

baik sebagai hambatan isu yang dapat memantik konflik maupun sebagai modal sosial dalam membangun perdamaian. Agama menjadi “pisau bermata dua” yang dapat digunakan sebagai modus sesuai dengan motif pelaku kepentingan. Oleh karena itu, penting kiranya agama sebagai *resources* sosial dioptimalkan menjadi agen perdamaian di Papua.

Agama merupakan variabel yang cukup penting dan sentral pada sistem sosial masyarakat di Papua. Signifikansi posisi agama ini tergambar melalui kearifan lokal “tiga tungku satu batu”, yang representasinya adalah agama, adat serta pemerintah (Wally 2018). Makna lain yang terkandung dari “tiga tungku” menyimbolkan tiga agama yang merupakan anutan orang asli Papua (selanjutnya

disebut OAP), yakni; Kristen, Katolik dan Islam (Sabara dan Kodina 2020). Harmonisasi “tiga tungku satu batu” ini kerap memperoleh ujian sehingga tak selalu berjalan dengan mulus. Sebagian kalangan mengklaim tanah Papua selaku “Tanah Injil” (*Gospel land*). Klaim ini seolah mengonstruksi identitas OAP identik dengan identitas Kristen. Klaim tersebut sudah lama dikonstruksi melalui proses sosial oleh diskursus yang dibangun oleh oknum gereja tertentu dengan mengonstruksi pengetahuan tentang identitas OAP sebagai penganut Kristen (Saputra 2017).

Generalisasi dan konstruksi identitas tersebut kerap memantik kesalahpahaman yang membuat fakta heterogenitas agama di Papua menjadi problem (Afwan 2015). Problem sosial yang kerap muncul di antaranya kecurigaan kepada pendatang yang umumnya beragama Islam. Dakwah Islam kepada masyarakat OAP sering diembuskan menjadi isu yang dapat memprovokasi terjadinya konflik sosial berlatar agama (Sabara 2012).

Jika mengacu pada fakta sosial, tidak bisa dipungkiri bahwa Islam merupakan agama yang juga menjadi anutan oleh sebagian OAP, meski dengan jumlah yang lebih minoritas. Namun, secara historis Islam adalah agama yang lebih dahulu masuk di Papua bahkan jauh sebelum misi Kristen masuk pada 1856, Islam masuk kemudian menjadi anutan oleh sebagian OAP di wilayah Papua bagian Barat, khususnya di daerah Kepala Burung pada kisaran abad XVI melalui jalur Kesultanan Tidore (Wanggai 2009). Agama Islam juga dianut oleh sebagian OAP yang bermukim di kawasan Pegunungan Tengah sejak 1960-an. Identitas OAP yang diidentikkan sebagai penganut Kristen berdampak kepada kalangan OAP Muslim. Hal ini membuat OAP Muslim tersubordinasi sehingga selalu berjuang untuk memperoleh penerimaan identitasnya sebagai Papua Muslim (Pamungkas 2015). Peneliti secara

langsung pernah mendengar klaim bahwa Papua selaku “Tanah Injil”. Klaim tersebut dilontarkan beberapa oknum pendeta, saat penelitian tentang konflik di sejumlah daerah di Papua.

Konstruksi mengenai nasionalisme ganda Papua menjadi faktor yang menguatkan klaim identitas OAP sebagai Kristen dan Papua sebagai “Tanah Injil”. Hal ini sebagai pembeda dengan identitas umumnya orang Indonesia yang mayoritas Muslim. Kesadaran mengenai identitas kepapuaan lebih dahulu tumbuh dan lebih menonjol sebelum ditanamkannya nasionalisme keindonesiaan” kepada OAP. Kesadaran tersebut kian mencuat disebabkan persaingan OAP dengan masyarakat pendatang (Syuhudi 2020). Nasionalisme ganda inilah yang kemudian memicu dikotomi identitas kepapuaan *versus* keindonesiaan. Polarisasi identitas serta nasionalisme kian tajam dengan adanya upaya konstruksi sejarah dan politik bahwa OAP merupakan orang Melanesia beragama Kristen yang mendapat diskriminasi dan perlakuan tidak adil oleh Indonesia sebagai bangsa dengan ras dan agama yang berbeda (Sabara 2019).

Wacana Papua-Kristen *versus* Indonesia-Islam merupakan salah satu alat propaganda sebagian kelompok OAP guna menggalang kekuatan untuk berpisah dari NKRI. Program transmigrasi serta banyaknya pendatang yang umumnya Muslim dicurigai sebagai usaha pemerintah NKRI dalam menancapkan kekuasaan dan dominasinya di Papua (Wonda 2007). Langkah untuk melawan dominasi pemerintah Indonesia dan nasionalisme keindonesiaan adalah dengan membenturkan identitas secara oposisi biner, termasuk identitas agama. Usaha delegitimasi identitas dan nasionalisme keindonesiaan di antaranya mempropaganda OAP bahwa pemerintah Indonesia melalui aparatnya telah banyak melakukan pelanggaran HAM di Papua. Saat yang sama digulirkan isu bahwa Muslim Papua merupakan pendukung NKRI. Wacana tersebut ditengarai dibentuk

secara sengaja oleh oknum tertentu guna memperoleh dukungan politik dari kalangan Muslim Papua (Sabara 2018).

Melihat rentannya konflik di Papua yang di antaranya menyeret isu agama, maka agama dengan ormas sebagai *resources*nya mesti terlibat dalam kerjasama aktif membangun perdamaian dengan pendekatan agama, kebudayaan maupun politik. Peran strategis ormas keagamaan ormas keagamaan selama ini di Papua berhasil menjaga situasi kerukunan umat beragama (selanjutnya disebut KUB) di Papua senantiasa tetap kondusif. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya angka indeks KUB yang diraih Provinsi Papua selalu berada di atas rata-rata nasional dan bahkan beberapa kali Papua masuk dalam tiga besar provinsi dengan indeks KUB tertinggi.

Beberapa peristiwa menunjukkan agama menjadi isu yang dibawa untuk melakukan propaganda konflik. Namun, sinergi berbagai elemen masyarakat, dari kalangan agama, adat serta pemerintah menjadikan eskalasi konflik dapat diredam hingga akhirnya berhasil direkonsiliasi dan direstorasi. Peran ormas keagamaan, melalui tokoh-tokohnya sangat signifikan dalam membangun perdamaian di Papua. Sinergi ini terlihat dengan jelas melalui nilai indeks KUB yang senantiasa berada pada kategori tinggi, tak hanya di variabel toleransi, namun juga di variabel kesetaraan serta kerja sama.

Nahdlatul Ulama (selanjutnya disebut NU) merupakan salah satu ormas Islam yang telah eksis di Papua sejak dekade 1960-an, bersamaan dengan proses integrasi wilayah Papua menjadi bagian dari NKRI. Di Kota Jayapura, NU berkembang dan membangun Masjid Jami' dan kawasan tersebut kemudian menjadi pusat perkembangan dan pergerakan Pemuda Anshor di Papua (Wanggai 2009). Masjid Jami' tersebut dalam perjalanan sejarahnya memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan pendidikan Islam di Papua (Dute 2021). Selain pengembangan dakwah dan pendidikan

Islam, kontribusi besar NU adalah sebagai agen Islam damai yang menjadi salah satu *resources* sosial yang aktif dalam kerjasama membangun kerukunan dan perdamaian di Papua. Kontribusi NU tersebut tak lepas dari peran aktif tokoh-tokohnya serta penerimaan masyarakat Papua non muslim terhadap NU. Hal ini tak lepas dari keberterimaan sosok Gus Dur yang diterima sebagai figur yang dekat dengan masyarakat Papua.

Peran penting NU sebagai agen perdamaian di Papua di antaranya dengan menampilkan wajah Islam damai sebagai anti tesa dari wajah Islam radikal yang kerap menjadi momok bagi sebagian kalangan di Papua. Selain itu dengan kerjasama aktif dalam melakukan konsolidasi lintas elemen dengan kelompok agama lainnya, baik sesama kelompok Islam maupun dengan kelompok non muslim. Hal strategis lainnya dengan peran aktif tokoh-tokoh NU baik di tingkat wilayah maupun cabang dalam meredam potensi dan kerentanan konflik serta melakukan koordinasi yang aktif dalam upaya membangun rekonsiliasi konflik, khususnya yang bernuansa agama, seperti konflik Tolikara, Wamena, Jayapura, Sentani serta kasus-kasus lainnya.

Tulisan ini mengulas tentang peran NU sebagai *resources* sosial keagamaan dalam peran strategisnya sebagai agen perdamaian di Papua yang dikaitkan dengan program Papua Tanah Damai (PTD). Tulisan ini mengangkat problem riset yaitu bagaimana peran NU dalam membangun dan menjaga perdamaian di Papua melalui visi Islam damai?, bagaimana peran NU dalam membangun KUB?, serta bagaimana peran NU dalam proses rekonsiliasi konflik dan restorasinya, khususnya pada konflik bernuansa agama?. Adapun wilayah Papua yang menjadi lokus dalam tulisan ini adalah Provinsi Papua sebelum dimekarkannya tiga provinsi baru sebagai daerah otonomi baru (DOB) pada 2022

TINJAUAN TEORETIS

Peran NU sebagai agen perdamaian di Papua dalam tulisan ini diulas dengan menggunakan teori agen dan struktur dalam teori strukturasi Anthony Giddens. Teori ini digunakan untuk menganalisis relasi antara aktor sebagai agen dan sistem sosial sebagai struktur yang berjaln kelindan dalam proses sosial pada fakta sosial yang objektif. Teori strukturasi menekankan pentingnya praktik sosial dalam agen maupun struktur (Nashir 2012). Praktik sosial dilihat sebagai akibat dari dialektika antara agen dan struktur (Adib 2012), dalam konsep Giddens disebut dualitas struktur dalam relasi yang saling mengandaikan (Giddens 2009), dualitas inilah yang menginspirasi Giddens dalam melahirkan teori strukturasi (Giddens 2010).

Agen yang dimaksud dalam tulisan ini adalah tokoh-tokoh NU Papua selaku aktor yang merepresentasikan NU, sedangkan struktur adalah *rules and resources* (Ashaf 2006) yang berhubungan secara dualitas dengan agen, yaitu aturan dalam sistem sosial yang berlaku di Papua baik bersifat formal maupun nonformal serta kelembagaan NU sebagai *resources*. Praktik dan proses sosial yang menjadi aksentuasi dalam relasi agen dan struktur adalah perdamaian dan hal-hal lain yang berkaitan seperti rekonsiliasi dan restorasi konflik, khususnya yang bernuansa agama. Reproduksi sosial hadir melalui dualitas antara praktik sosial dari agen dan struktur sosial (Suminar 2020). Dalam tulisan ini reproduksi sosial yang dimaksud adalah reproduksi perdamaian antar kelompok agama dan masyarakat di Papua. Perdamaian diproduksi sebagai akibat dari kerjasama antarkelompok keagamaan sebagai *resources* sehingga menjadi katup kohesi yang menstimulasi peningkatan kesadaran dalam hidup bersama di tengah keragaman (Harpham, Grant, dan Thomas 2002)

Damai sering dipersepsikan secara negatif sebagai ketiadaan konflik, padahal sejatinya damai bukan sekadar nir-konflik,

lebih dari itu damai secara positif adalah suasana yang harmonis (Nurcholish 2015). Perdamaian yang dimaksud dalam tulisan ini merujuk pada konsep perdamaian negatif dan perdamaian positif menurut Johan Galtung. Perdamaian negatif mendasarkan pada tidak adanya tindakan kekerasan secara langsung. Sedangkan perdamaian positif lebih berfokus pada tindakan preventif, akan kemungkinan terjadinya konflik yang disebabkan problem struktural, seperti diskriminasi berbasis identitas sosial tertentu (Khaswara dan Hambali 2021).

Perdamaian positif bersifat multidisipliner serta mencakup nilai-nilai moral serta visi kehidupan sosial yang lebih luas dari sekadar nir-konflik, nir-kekerasan atau upaya menghindarinya (Barash 2000). Sebuah suasana di mana hadirnya keadilan dan kesejahteraan dalam hubungan yang non diskriminatif dan kerjasama yang setara Singkatnya, damai adalah suasana kenyamanan batin (Sims, Nelson, dan Puopolo 2014) yang hidup aman dalam diri dan lingkungan, meski hidup dalam kepelbagaian (Navarno-Castro dan Nario-Galace 2008). Prinsip perdamaian adalah mengeliminir berbagai hambatan yang memungkinkan terjadinya disharmoni dan diskriminasi dalam kehidupan sosial yang diliputi kepelbagaian. Jika terjadi konflik, maka proses rekonsiliasi yang dilakukan tidak sekadar menekankan pada pemerataan keadilan yang bersifat distributif, namun juga keadilan yang bersifat restoratif (Bräuchler 2015).

Papua Tanah Damai (selanjutnya disebut PTD) merupakan gagasan yang diusulkan dan dipopulerkan oleh sejumlah tokoh pada 2003. Konsep PTD digulirkan guna meningkatkan suasana sosial yang kondusif yang karenanya berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat Papua. Konsep PTD secara aplikatif digunakan sebagai kerangka referensi untuk menganalisis serta mengkritisi proses pembangunan di Papua (Sugandi 2008). Pada 2013, PTD kemudian dicanangkan sebagai momen untuk menyatukan visi

bersama semua komponen masyarakat yang berada di Papua. Pencanangan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh agama, tokoh paguyuban suku dan Forkopimda Papua yang mengambil momen peringatan Hari PTD ke-10 yang bertepatan dengan hari masuknya Injil di Papua, 5 Februari 2013. (Jaringan Damai Papua 2013).

PTD adalah simbol yang menunjukkan sinergi antar elemen selaku katup kohesi yang secara aktif berperan dalam mewujudkan dan menjaga perdamaian di Tanah Papua. PTD menunjukkan sinerginya seluruh komponen masyarakat sebagai *resources* dengan para tokoh sebagai agennya, bertindak selaku katup kohesi guna merekatkan perbedaan sekaligus menjadi modal sosial menciptakan budaya damai pada masyarakat Papua yang bineka. Sinergi tersebut diwujudkan dalam pendekatan lintas bidang yang multi perspektif di semua aspek kehidupan. Pada intinya, PTD adalah bagaimana semua elemen masyarakat selaku *resources* sosial berposisi sejajar dan saling menghargai serta mengemban tanggung jawab dalam penyelesaian persoalan di Tanah Papua (Marit dan Warami 2018). Sebagai gerakan, PTD dibangun melalui dialog, pada Konferensi Damai Papua, yang diselenggarakan Juli 2011 disepakati bahwa cara terbaik untuk menyelesaikan persoalan Papua adalah melalui dialog (Pamungkas 2017).

METODE PENELITIAN

Tulisan ini didasarkan pada data-data yang didapatkan dari serangkaian riset yang peneliti lakukan selama sepuluh tahun (2012-2022) di Papua. Serangkaian riset tersebut mencakup riset tentang keagamaan, pengelolaan keragaman, perdamaian dan konflik di Jayapura, Sentani, Tolikara dan Wamena. Data-data yang diperoleh melalui wawancara mendalam kepada sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah. Tokoh NU di Papua menjadi informan kunci yang

memberikan data terkait tema tulisan ini.

Dalam beberapa kesempatan peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan terlibat, seperti dalam kasus konflik Sentani, Tolikara dan Wamena. Studi dokumen digunakan untuk melengkapi data-data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Selanjutnya data-data disajikan secara deskriptif kritis dengan memadukan pendekatan etik dan emik. Peneliti menyajikan narasi berdasar *native point of view* dan saat yang sama menganalisis dengan *researcher point of view*.

PEMBAHASAN

NU sebagai Agen Islam Damai

NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia dan sebagian kalangan memprediksi NU sebagai organisasi Islam terbesar di dunia. NU dikenal sebagai kelompok Islam dengan wajah Islam yang pluralis, toleran dan beradab. Pandangan ini disampaikan oleh beberapa peneliti asing di antaranya Greg Barton (2002) dan Robert W. Hefner (2000). Alfred C. Stepan (2000) menyebut NU sebagai “tulang punggung” toleransi pada masyarakat sipil, sedangkan Jeremy Menchik (2014) menyebut NU sebagai kelompok yang membela kebebasan beragama. Menchik (2016) juga menyebut NU sebagai pilar demokrasi Islam di Indonesia. Meski demikian, harus diakui pula bahwa gagasan mengenai Islam toleran yang diusung NU belum tentu diterima dan dijalankan oleh semua anggotanya, hal inilah yang dikritik oleh Mietzner dan Muhtadi (2020) sebagai “*myth of pluralism*”. Namun kritikan tersebut tidak menegasi signifikansi peran NU sebagai ikon umat Islam Indonesia yang menampilkan wajah Islam yang toleran dan damai, mengusung semangat nasionalisme dan di saat yang sama bersikap akomodatif terhadap lokalitas.

Sebagai kelompok Islam terbesar sekaligus representasi Islam tradisional khas Indonesia, tentunya NU mempunyai posisi strategis dalam mempromosikan perdamaian melalui pesan Islam damai,

khususnya dalam konteks keindonesiaan. Komitmen NU pada Islam keindonesiaan diwujudkan dengan mencanangkan Islam Nusantara sebagai “*branding*”nya. Melalui gagasan Islam Nusantara, NU tidak saja menegaskan haluan ideologi keislamannya, lebih dari itu NU menegaskan sebuah formula konsep Islam yang damai dan toleran. Islam Nusantara merupakan manifestasi wajah keislaman NU yang di antara tujuannya adalah untuk mewujudkan perdamaian (Munfaridah 2017). Melalui pilihan ini, NU hendak melanjutkan jalan sejarah Islam yang masuk di Indonesia dengan jalan damai dengan membuktikan kehadirannya sebagai pembawa misi Islam damai, karena sejatinya Islam adalah agama damai (Bilfagih 2016).

Misi Islam damai dengan menampilkan wajah Islam yang toleran, santun dan akomodatif inilah yang juga di bawa ke Papua. NU di Papua konsisten mengusung Islam *rahmatan lil alamin* dalam pengertian Islam yang moderat, berakulturasi dengan kultur lokal serta mengedepankan dialog dalam memahami dan menjembatani perbedaan (Pamungkas 2016). Pendekatan dialog ini sinergis dengan program PTD yang menjadikan dialog sebagai satu-satunya cara dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi Papua. Oleh karena itu, NU melalui tokoh-tokohnya terlibat aktif dalam membangun dialog mengenai persoalan keagamaan, budaya, ekonomi, politik serta berbagai persoalan lainnya yang dihadapi oleh masyarakat Papua. Dialog yang dimaksud adalah untuk menyentuh pikiran dan hati orang Papua, sehingga dapat bersatu dalam visi dan tekad untuk membangun Papua (Dr. Toni Wanggai, Ketua PWNU Papua, wawancara 21/07/2022 di Jayapura)

Menurut Dr. Toni Wanggai Mudahnya NU membangun pendekatan dan dialog dengan elemen masyarakat Papua lainnya tak lepas dari pengaruh citra Gus Dur pada masyarakat Papua sangat kuat. Figuritas Gus Dur membuat NU sangat mudah diterima oleh semua kalangan di Papua. Mengenai hal ini, Toni

Wanggai menuturkan;

“Citra Gus Dur sebagai bapak bangsa, sangat kuat dalam memori umumnya orang Papua. Orang Papua sangat mengapresiasi peran dan jasa Gus Dur kepada Papua. Misalnya dengan mengizinkan penggantian nama Irian menjadi Papua, serta pendekatan Gus Dur kepada rakyat Papua, terutama saat beliau menjabat presiden sangat berkesan. Hal inilah yang menjadi kekuatan besar bagi NU di Papua sehingga dapat diterima oleh semua kalangan. Berkat kiprah dan jasa Gus Dur, NU diterima sebagai Islam yang damai dan toleran, sehingga sangat mudah bagi NU di Papua untuk menjalin komunikasi dan kerjasama dengan kelompok mayoritas masyarakat Papua yang beragama Kristen.”

Sosok Gus Dur dicitrakan sebagai sosok bapak yang sangat mengayomi anak-anaknya yang beragam, terutama Papua yang berbeda secara agama dan ras dengan mayoritas penduduk Indonesia. Penerimaan terhadap NU oleh OAP yang dominan Kristen, karena citra sosok Gus Dur. Citra tersebut tak lepas dari kiprah dan peran Gus Dur bukan hanya dalam melakukan pendekatan terhadap Papua, lebih luas lagi yaitu karena dedikasi Gus Dur dalam merawat dan mengayomi keragaman. Gus Dur adalah sosok humanis yang berhasil membawa pesan universal Islam yang humanis saat membangun pendekatan dan dialog dengan kelompok agama lain (Aqil 2020).

Sebagai bapak bangsa, Gus Dur adalah sosok pengusung pluralisme yang berupaya menanamkan kesadaran akan pentingnya sikap saling menerima dalam keragaman (Setiawan 2017). Visi dan misi pluralisme Gus Dur sangat berkesan bagi masyarakat Papua, terlebih ketika Gus Dur membuktikan komitmennya tersebut saat menjabat sebagai presiden. Hal yang tak bisa dilupakan oleh masyarakat Papua

adalah ketika Gus Dur mengizinkan perubahan nama Irian menjadi Papua. Sosok Gus Dur dalam perspektif orang Papua adalah “Gus Dur *Katong pu bapa*” (Gus Dur adalah bapak kita).

Pendekatan humanis dan pluralis yang dilakukan oleh Gus Dur saat menjabat sebagai presiden sangat menyentuh lubuk hati masyarakat Papua. Pada 1 Januari 2000, sebagai presiden Gus Dur secara terbuka menyatakan permohonan maaf terhadap rakyat Papua atas pelanggaran HAM, mengubah nama Irian menjadi Papua, mengizinkan pengibaran bendera bintang kejora dan kebijakan lainnya yang berhasil merangkul hati masyarakat Papua. Gus Dur sangat memahami kegelisahan yang telah lama dirasakan oleh masyarakat Papua, karena itulah di masa kepemimpinannya Gus Dur berhasil meredam konflik antara pro dan kontra Papua merdeka, lebih dari itu Gus Dur bahkan berhasil meredam konflik antar agama dan berhasil membangun hubungan yang erat antarkelompok agama di Papua (Hakim dan Anjani 2022).

Kiprah dan jasa Gus Dur sangat memengaruhi citra Islam dalam imaji masyarakat Papua. Hal inilah yang diwarisi oleh NU di Papua yang kemudian melanjutkan misi dan perjuangan Gus Dur dalam membawa misi Islam damai di Papua. Tantangannya adalah keberadaan kelompok radikal Islam yang bahkan telah masuk ke Papua dengan menampilkan kesan dan citra Islam yang tak ramah. Namun, kesan tentang keislaman yang damai dari Gus Dur berhasil menjadi penetral atas kesan radikal dari beberapa kelompok Islam trans-nasional. Hal ini diakui oleh Pdt. Albert Yoku, mantan ketua SInode GKI Papua (wawancara, 16/03/2018 di Sentani), NU adalah kelompok Islam yang paling bisa diterima oleh masyarakat Papua dan hal tersebut tak lepas dari peran besar dari sosok Gus Dur.

Misi membawa NU sebagai agen Islam damai di Papua tak terlepas dari profil tokoh NU yang berdarah Papua, di antaranya adalah Toni Wanggai, Thaha

Alhamid. dan beberapa tokoh lainnya. NU pertama kali mulai masuk dan berkembang di Papua pada 1965, melalui daerah Fak-fak yang *notabene* daerah dengan populasi Muslim asli Papua yang cukup banyak. Masuknya Muslim pendatang dari Sulawesi semakin memperkuat gerakan NU, terutama melalui gerakan sayapnya, yakni Gerakan Pemuda Anshor. NU berkembang di Jayapura dan membangun Masjid Jami yang kemudian menjadi pusat pergerakan Pemuda Anshor (Wanggai 2009). Pada 2010, Dr. Toni Wanggai, putra Papua berdarah Serui terpilih sebagai ketua PWNU Papua, sedangkan PC NU Kota Jayapura diketuai oleh Abdul Kahar Yelipele, putra asli Papua dari Walesi, Jayawijaya. Thaha Al-Hamid yang juga putra berdarah Papua asal Fak-fak merupakan tokoh NU yang aktif sebagai sekretaris Presidium Dewan Papua. Tokoh muda NU asli Papua lainnya, yaitu Fadhil Alhamid yang aktif di Majelis Muslim Papua (MMP) serta Abu Hanifah Asso yang saat ini menjadi anggota DPRD Provinsi Papua.

Tokoh-tokoh NU asli Papua tersebut bersinergi dengan tokoh NU dari kalangan pendatang untuk menebarkan misi Islam sebagai agama damai, sehingga kehadiran Islam dapat diterima oleh kalangan masyarakat Papua secara umum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Papua. Eksistensi Islam sebagai agama yang juga dianut oleh OAP diakui dengan diafirmasinya perwakilan Muslim Papua sebagai anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) pada Kelompok Kerja (Pokja) Agama. Saat ini wakil Muslim Papua yang menjadi anggota MRP adalah Dr. Toni Wanggai. Menurut Toni Wanggai, dia berjuang untuk memperkenalkan nilai Islam *rahmatan lil alamin* di Papua melalui jalur kultur dan struktur yang keduanya direpresentasikan melalui MRP. MRP adalah lembaga politik formal yang menjadi perwakilan OAP dan memiliki kewenangan dalam hal perlindungan hak-hak OAP dengan berlandas penghormatan pada adat Papua, pemberdayaan perempuan

asli Papua serta pemeliharaan KUB (Priyani 2019). Melalui MRP, khususnya pada Pokja Agama, Toni Wanggai menjalankan tugas dan kewenangan berkenaan dengan menjaga relasi antar umat beragama di Papua demi mewujudkan Papua sebagai tanah damai. Berkenaan dengan hal tersebut Toni Wanggai menuturkan;

“Sebenarnya tugas saya cukup berat, namun ini adalah amanah. Saya adalah satu-satunya wakil Muslim asli Papua dari 17 anggota Pokja Agama. Keterwakilan Muslim hanya satu orang karena populasi Muslim asli Papua yang bermukim di Provinsi Papua memang minoritas, anggota lainnya empat orang dari perwakilan Katolik dan 12 orang perwakilan gereja-gereja Kristen Protestan. Seorang diri sebagai wakil Muslim asli Papua di MRP, tantangan sekaligus tugas terberat saya adalah berhadapan dengan stigma tentang Islam sebagai bukan agama orang Papua. Padahal menurut sejarah, Islam adalah agama yang lebih dahulu masuk di Papua sekitar abad XV, jauh lebih dahulu dari Kristen yang pertama kali masuk di Papua pada 1856. Bahkan sejarah tentang kedatangan dua misionaris Kristen yang pertama membawa Injil masuk Papua diantar oleh utusan Kesultanan Tidore. Sejak awal pada dasarnya Islam telah menunjukkan keramahan dan kedamaiannya di Papua. Hal inilah yang berulang-ulang saya tekankan dan pahami kepada sebagian OAP yang masih alergi dengan Islam. Tentu ini bukan tugas yang mudah, untungya posisi saya sebagai ketua PWNU Papua cukup membantu hal tersebut, karena orang papua mengidentikkan NU dengan Gus Dur dan pada sosok Gus Dur,

orang Papua sangat hormat” (Wawancara, 9 Maret 2018, di Abepura).

Tokoh lainnya, yaitu Thaha Alhamid yang aktif dalam Presidium Dewan Papua sebagai sekretaris menuturkan;

“Keberadaan dan keaktifan saya di Presidium Dewan Papua diantaranya untuk menunjukkan bahwa OAP Muslim juga punya komitmen ke-Papua-an sama dengan OAP yang lain. Perjuangan membebaskan rakyat Papua dari kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan merupakan tugas bersama tanpa memandang agama. Oleh karena itu, saya sebagai OAP Muslim melalui presidium tersebut membangun relasi yang baik dengan segenap tokoh-tokoh Kristen Papua lintas denominasi. Sekadar untuk menunjukkan bahwa Islam-Kristen itu saudara, moyang orang Papua tidak pernah mengajarkan saling membunuh karena perbedaan agama. Perjuangan yang sesungguhnya adalah memperjuangkan taraf hidup, kesejahteraan dan kemajuan OAP apapun agamanya. Tokoh-tokoh Papua mengenal saya sebagai orang NU, karena itu membuat saya lebih mudah membangun komunikasi dan kerjasama dengan mereka. Karenanya tak sulit mengenalkan Islam dengan corak yang damai, karena mereka mengenal NU adalah sosok Gus Dur, sosok bapak pluralisme yang diterima oleh segenap masyarakat asli Papua (Wawancara, 27 Maret 2017, di Jayapura).

Sebagian masyarakat asli Papua yang beragama Islam adalah masyarakat asli yang bermukim di sekitar Lembah Baliem Kabupaten Jayawijaya. Islam masuk ke wilayah ini sekitar dekade 1960-

an tak lama setelah misionaris membangun pos penginjilan di kawasan tersebut. Pada awal masuknya kedua agama tersebut pada era Orde Baru sempat terjadi ketegangan akibat gejolak politik yang terjadi Papua, khususnya di wilayah pegunungan. Muslim asli Papua pegunungan perlahan tapi pasti berupaya membangun hubungan baik dan rekonsiliasi dengan OAP lainnya. Pendekatan yang dilakukan adalah dialog kebudayaan serta bersinergi dengan masyarakat Muslim pendatang dalam upaya membumikan visi Islam *rahmatan lil alamin* selaku agama damai, khususnya di Papua. Mengenai hal tersebut, Abu Hanifah Asso (Wawancara, 16 Februari 2016, di Walesi) menuturkan;

“Kami warga Muslim asli Jayawijaya memosisikan diri sebagai kaum Anshar dan saudara Muslim pendatang dari Sulawesi, Jawa dan lainnya sebagai kaum Muhajirin. Sebagai kaum Anshar kami dengan tangan terbuka menyambut kedatangan saudara-saudara kami yang berhijrah ke sini untuk bersama membangun penghidupan yang lebih baik dan memelihara kedamaian tanah Papua. Oleh karena itu, pendekatan dialog dan kebudayaan kami sangat tekankan agar kami selaku Muslim baik masyarakat asli maupun pendatang dapat diterima oleh masyarakat Papua. Tugas ini tentunya tidak mudah, melalui PC NU Kabupaten Jayawijaya bersama ormas Islam lainnya seperti YAPIS dan Muhammadiyah, kami bersinergi untuk mewujudkan hal tersebut”.

Keberhasilan NU sebagai agen Islam di Papua yang diperjuangkan melalui tokoh-tokohnya, khususnya yang berasal dari OAP dalam pandangan penulis merupakan salah satu variabel yang menjaga kondusivitas Papua sejatinya sangat rentan konflik. Persoalan kesenjangan ekonomi dan gejolak politik

adalah variabel yang sangat rentan memantik konflik yang sesekali membawa isu agama. Namun, dengan keberadaan NU sebagai agen Islam damai, menjadikan NU sebagai salah satu katup kohesi yang merekatkan perbedaan melalui pendekatan dialog dan kebudayaan. NU merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan PTD melalui kiprah tokoh-tokohnya yang memperkenalkan wajah Islam damai kepada masyarakat Papua.

Peran Aktif dalam Membangun Harmoni KUB

Peran penting sebagai agen perdamaian adalah dengan komitmen membangun harmoni KUB. Masyarakat Papua adalah masyarakat yang plural baik dari segi etnik dan agama, karena itu kerentanan konflik sosial dan agama sangat besar, terlebih dengan adanya kesenjangan ekonomi dan gejolak politik. Bagi masyarakat Papua (OAP maupun non OAP), KUB umumnya secara kultural telah tertanam di dalam batin masyarakat. Fakta ini terlihat melalui sikap ekspresif yang ditunjukkan dengan aksi saling menjaga, mendukung dan bekerja sama antarkelompok agama (Sabara dan Kodina 2020).

Hal yang jamak terjadi saat Idulfitri umat Kristiani menjaga saudara mereka yang sedang melaksanakan Salat Idulfitri. Demikian halnya saat Natal, umat Islam terlibat aktif menjaga kondusivitas demi ketenangan dan kenyamanan saudara-saudara mereka yang merayakan Natal. Tradisi “pegang tangan” atau silaturahmi adalah budaya yang dilakukan saat Natal maupun Idulfitri. Kuatnya KUB meski dalam ancaman dan bayang-bayang kerentanan konflik disebabkan kuatnya semangat komunal. Hal tersebut menjadikan KUB terbangun didasarkan pada saling penerimaan dan pengakuan. Karena hal tersebut, walaupun rentan potensi konflik di Papua, namun tak sampai membawa isu agama untuk diembuskan secara dominan,

Sinergi antarelelemen dalam

masyarakat yang menjadi penopang “tiga tungku satu batu”, yaitu adat, agama dan pemerintah merupakan kata kunci dari terciptanya KUB di Papua. Fakta kondusivitas KUB di Papua ditunjukkan dengan tingginya angka indeks KUB yang diraih oleh Provinsi Papua setiap tahunnya, demikian pula dengan pemberian Harmony Award kepada Kota Jayapura dan ditetapkannya Kabupaten Jayapura sebagai Zona Integritas Kerukunan. Sinergi antareleman masyarakat dalam pemeliharaan KUB terwujud dengan mengedepankan pendekatan dialog. Ketika terjadi ketegangan yang membawa isu agama yang potensial memicu konflik, berbagai elemen masyarakat segera melakukan dialog untuk mendapatkan solusi bagi penyelesaian masalah. Sinergitas semua elemen masyarakat di Papua ini menunjukkan sehat dan aktifnya kelompok masyarakat sipil dalam menjaga dan merawat harmoni KUB di Papua dalam bingkai PTD sebagai *common platform*.

Kata toleransi mungkin tak cukup untuk menggambarkan harmoni KUB di Papua Afwan, (2015), khususnya ketika menggambarkan relasi harmonis dan *best practice* hubungan Muslim-Kristen (termasuk Katolik) Gambaran mengenai relasi antarumat beragama pada masyarakat Papua lebih tepat jika direpresentasikan melalui istilah “pengakuan”. Elemen masyarakat, khususnya kelompok agama menjadi pilar dan katup kohesi yang memungkinkan terjadinya sikap saling pengakuan eksistensi satu sama lain dalam perbedaan. Pada ranah inilah NU sebagai ormas Islam terbesar di Papua menorehkan peran strategisnya. Thaha Alhamid mengungkapkan, umumnya masyarakat Muslim Papua baik OAP maupun pendatang secara tradisi adalah *nahdiyyin*. Terwujudnya kondusivitas KUB di Papua tak terlepas dari peran warga *nahdiyyin* yang pro aktif menjalin hubungan baik dengan penganut agama lain.

Peran penting NU sebagai agen perdamaian adalah dengan upaya membangun harmoni KUB melalui

pendekatan dialog dengan segenap elemen masyarakat Papua yang beragama lain. Abdul Kahar Yelipele, selaku Ketua PC NU Kota Jayapura (wawancara, 17/03/2018 di Jayapura) mengungkapkan perspektif dan sikap NU terhadap penganut agama lain didasarkan pada prinsip *tasamuh*, *tawasuth* dan *i'tidal*. Berdasarkan ketiga prinsip tersebut, warga *nahdiyyin* terutama tokoh-tokohnya bersikap terbuka dalam membangun dialog dan kerjasama yang aktif melalui pendekatan sosial dan budaya kepada semua penganut agama di Papua. Pekspektif serta sikap keislaman yang moderat tersebut membuat NU diterima oleh pihak gereja dalam membangun kerjasama dan dialog guna membangun dan merawat harmoni KUB di Papua.

Semenjak awal, NU telah menunjukkan perhatian dan perannya bagi kemajuan masyarakat Papua, di antaranya dengan ikut serta mendirikan Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) pada 15 Desember 1968 di Jayapura yang saat itu bernama Soekarnopura. Pendirian YAPIS ditujukan membangun Papua melalui jalur pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan, YAPIS telah merambah pada semua jenjang mulai dari PAUD hingga universitas. Meski membawa nama Islam, YAPIS memilih jalan inklusif dengan menerima siswa/mahasiswa, tenaga pengajar bahkan pegawai yang berasal dari non muslim (Sabara dan Kodina 2020).

Perguruan YAPIS yang ada di Wamena misalnya sebagian besar siswa/mahasiswanya adalah OAP yang beragama Kristen. Karena sikap yang inklusif dan moderat inilah menurut Aziz Bauw (pengurus YAPIS yang juga OAP Muslim asal Fak-fak, wawancara, 16/03/2018) membuat YAPIS tak cuma menjadi milik umat Muslim saja, namun YAPIS adalah milik semua masyarakat Papua.

Menjadi agen perdamaian melalui peran aktif dalam memelihara kondusivitas KUB di Papua ditunjukkan melalui praktik nyata oleh warga dan tokoh NU. Setiap tahunnya, NU melalui Gerakan Pemuda

Anshor aktif terlibat dalam pengamanan peringatan Natal. Pemuda NU dari Anshor bersama pemuda Muslim lainnya melakukan pengamanan gereja pada saat malam dan hari Natal. Hal ini dilakukan selain untuk menunjukkan komitmen pada pemeliharaan harmoni KUB juga dalam rangka membantu kekhusyukan umat Kristiani saat beribadah dan merayakan Natal. Saat acara Natal bersama berupa *open house* yang diadakan oleh gereja baik Katolik maupun Kristen, tokoh-tokoh NU selalu diundang dan menyempatkan hadir pada acara tersebut. Warga dan tokoh *nahdiyyin* mendatangi rumah tetangga, kerabat dan kolega mereka yang merayakan Natal atau dalam istilah lokal disebut “baku peta” atau “pegang tangan”. Penulis menyaksikan dan mengalami sendiri tradisi “baku peta” saat berkesempatan hadir di Jayapura saat Hari Natal pada 2013 dan 2014. Umat Muslim datang bersilaturahmi untuk mengucapkan selamat kepada umat Kristiani yang sedang merayakan Natal. Umat Muslim yang kebanyakan pedagang pada hari Natal menutup dagangannya demi melakukan “baku peta”.

Toni Wanggai dalam kapasitas sebagai Ketua PWNU Papua kerap diminta memberi sambutan pada acara Natal bersama yang diadakan oleh persekutuan gereja atau denominasi gereja tertentu. Menurut Toni Wanggai, saat memberi sambutan dia memberikan penjelasan mengenai konsep toleransi dalam ajaran Islam dan menjelaskan Islam sebagai agama damai. Selain itu, Toni Wanggai juga menyinggung tentang perspektif Islam yang mengagungkan Isa atau Yesus sebagai manusia suci yang wajib diimani oleh umat Islam. Tokoh-tokoh Kristen sangat mengapresiasi sambutan yang disampaikan oleh Toni Wanggai dan memberikan pemahaman kepada mereka mengenai wajah Islam yang moderat, dalam hal ini direpresentasikan oleh NU. Pendeta Albert Yoku (Mantan Ketua Sinode GKI, wawancara 28 Maret 2017, di Sentani) mengungkapkan apresiasi tersebut;

“Hubungan saya dan Pak Toni

Wanggai sudah seperti saudara, dia sudah saya anggap seperti adik saya. Ketika Idulfitri saya datang ke dia dan saat Natal dia juga datang ke saya. Saat Natal bersama yang diadakan oleh GKI, Pak Toni diminta memberikan sambutan selaku tokoh Islam. Luar biasa isi sambutan Pak Toni benar-benar menyejukkan dan memahami kami semua mengenai apa Islam yang sebenarnya. Kepentingan saya meminta beliau untuk memberi sambutan dalam acara Natal bersama tersebut adalah untuk menunjukkan kepada jemaat GKI yang beberapa masih stereotipe terhadap Islam, bahwa Islam sebenarnya tidak sebagaimana yang mereka tuduhkan. Pak Toni berhasil memenuhi aspirasi saya tersebut, dengan gayanya yang humoris, Pak Toni memberikan sambutan yang sangat berkesan bagi kami”.

Peran aktif dalam memelihara harmoni KUB melalui pendekatan kebudayaan juga dilakukan oleh OAP Muslim di Wamena. Masyarakat Pegunungan Tengah memiliki tradisi “bakar batu” yaitu tradisi pesta atau makan bersama dalam rangka sebuah hajatan atau sebagai media penyelesaian permasalahan dan konflik. Tradisi bakar batu juga menjadi momen yang mengeratkan dan mengakrabkan masyarakat yang sebelumnya sempat berkonflik (Jiharudin dan Mustofa 2022). Bakar batu merupakan cara memasak makanan mentah berupa hasil bumi dan ternak (biasanya babi) yang dibakar dengan batu hingga matang.

Tradisi ini merupakan warisan kearifan lokal masyarakat Papua pegunungan yang telah berlangsung turun-temurun. Masyarakat Muslim di pegunungan, terutama OAP Muslim yang berasal dari kalangan *nahdiyyin* menjadikan momen acara bakar batu tersebut sebagai momen budaya untuk menjalin silaturahmi dan mempererat persaudaraan kepada

sesama warga Papua. Pilihan akomodatif terhadap kebudayaan lokal yang merupakan khas NU, membuat warga *nahdliyin* di Pegunungan Tengah tetap melestarikan tradisi tersebut. Umat Kristen paham betul mengenai keharaman babi bagi umat Muslim, maka pada momen bakar batu tersebut untuk umat Islam, ternak babi diganti dengan ayam dan kambing. Acara bakar batu menjadi salah satu momen kebudayaan yang memberi kontribusi positif dalam merawat silaturahmi dan menjaga harmoni KUB pada umat beragama di Pegunungan Tengah.

Peran dalam Rekonsiliasi dan Restorasi Konflik

Kompleksnya permasalahan sosial memicu tingginya kerentanan konflik horizontal. Sesekali peta konflik merembet membawa isu agama sehingga terkesan terjadi konflik sosial bernuansa agama. Walau sejatinya, agama dilibatkan sebagai variabel konflik hanya pada level manifes. Problem yang terjadi di Papua sesungguhnya jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar problem keagamaan ataupun persoalan hubungan antar umat beragama (Juditha 2016).

Agama menjadi isu yang seksi dalam menyulut konflik dikarenakan konstruksi sosio-demografis penduduk Papua yang multi ras dan multiagama. Kesenjangan ekonomi penduduk Muslim dengan Kristen yang dipandang mewakili (umumnya) OAP serta (umumnya) penduduk pendatang. Secara politik, terkhusus pada kelompok OAP yang pro kemerdekaan, Islam kerap diidentikkan dan dikaitkan dengan NKRI serta Kristen diatribusi sebagai identitas Papua. Bila merujuk kepada konstruksi sosio-demografis serta wacana yang berupaya menggiring disparitas keagamaan masyarakat, khususnya antara OAP dan pendatang. Maka, akan disimpulkan bahwa problem agama amat sensitif serta sangat rentan sebagai pemicu dan pemantik konflik sosial. Namun, pada faktanya intensitas konflik sosial bernuansa agama

yang terjadi tidak seperti yang dikhawatirkan.

Beberapa kali peristiwa konflik sosial bernuansa agama terjadi di beberapa daerah di Papua. Peristiwa konflik tersebut cukup mengganggu dan menjadi catatan bagi fakta harmoni KUB. Konflik tersebut untuk beberapa saat memicu kerenggangan jarak sosial antar umat beragama, meski eskalasi serta durasinya dapat diatasi dan dibatasi. Prof. Partino (Ketua PW Muhammadiyah Papua, Wawancara 18 Maret 2018, di Abepura) menyatakan KUB di Papua sangat kondusif. Namun, tidak dapat dipungkiri ada beberapa kejadian yang meski bersifat kasuistik dan insidental tapi mengindikasikan masih adanya problem terkait KUB di Papua yang dapat mengancam harmoni antar umat beragama.

Pemberitaan mengenai diskriminasi umat beragama dalam skala nasional kerap memengaruhi relasi KUB. Misalnya pemberitaan mengenai pembangunan gereja di daerah lain yang mendapatkan hambatan atau pelarangan. Pemberitaan tersebut kerap menjadi dalih sebagian kalangan OAP Kristen untuk melakukan penolakan atas pembangunan masjid. Kasus-kasus pembangunan rumah ibadat, khususnya masjid, beberapa kali memantik ketegangan antar umat, walaupun hal tersebut tak selalu hadir dalam bentuk manifes konflik.

Kejadian yang sempat viral adalah ketika terjadi upaya penolakan terhadap renovasi dan pembangunan menara Masjid Agung al-Aqsha Kabupaten Jayapura di Sentani. Peristiwa tersebut terjadi pada Maret 2018 saat penulis sedang berada di Jayapura. Persekutuan Gereja-gereja di Jayapura (PGGJ) mengeluarkan beberapa poin petisi yang di antaranya menolak pembangunan menara masjid tersebut. Berita penolakan tersebut menjadi pemberitaan yang cukup viral serta mengesankan telah terjadi ketegangan antar umat beragama di Kabupaten Jayapura, padahal setahun sebelumnya Kabupaten Jayapura dicanangkan menjadi Zona Integritas Kerukunan. Penolakan

pembangunan (renovasi) masjid agung kabupaten juga terjadi pada Maret 2016 di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Suara penolakan berasal dari Persekutuan Gereja-gereja Jayawijaya yang mengeluarkan beberapa poin petisi. Beberapa saat setelah kejadian tersebut, penulis ke Wamena untuk melakukan *fact finding*. Penulis menemukan juga beberapa kasus terkait penolakan pembangunan masjid, utamanya pada wilayah Papua Pegunungan. Kasus-kasus tersebut cukup memengaruhi harmoni KUB, namun wacana penolakan tak sampai termanifestasi menjadi konflik horizontal.

Penulis pernah melakukan *fact finding* pada kedua kasus tersebut dan mendapati adanya problem politik simbol. Pembangunan masjid yang berada di tempat strategis dan terkesan mewah ditengarai “mengaburkan” atribusi Papua selaku daerah mayoritas Kristen. Hal ini tentu tidak menjadi representasi suara dan aspirasi umat Kristiani di Papua. Namun, sebagian oknum menggunakan isu tersebut sebagai isu populis guna memperoleh dukungan masyarakat Kristen Papua, khususnya OAP. Klaim Papua selaku “Tanah Injil” merupakan klaim yang selalu digulirkan oleh sebagian pihak menjadi isu politik yang populis di kalangan umat Kristiani. Karena Papua selaku Tanah Injil, dijadikan alasan untuk melarang pembangunan masjid, melarang suara azan hingga melarang penggunaan jilbab oleh Muslimah. Penulis mendapatkan pernyataan provokatif tersebut melalui selebaran ketika melakukan *fact finding* di Tolikara (2015). Hal yang sama juga terjadi pada kasus penolakan Masjid Agung di Wamena dan Sentani. Seruan dan provokasi tersebut tidak mendapat respons yang berarti oleh umumnya umat Kristiani di Papua, karena itulah eksisnya tidak luas.

Konflik yang merembet pada isu agama yang sempat termanifestasi adalah pada 17 Juli 2015 yang bertepatan dengan peringatan Idulfitri yang kemudian dikenal dengan peristiwa “Idulfitri Berdarah”. Pemantik konflik terjadi saat

diselenggarakannya KKR (Kebangunan Kebangkitan Rohani) oleh Pemuda GIDI (Gereja Injili di Indonesia). Kegiatan tersebut cukup kolosal dengan mendatangkan ribuan peserta termasuk dari mancanegara. Sebelum kegiatan tersebut, GIDI mengeluarkan surat edaran yang melarang pelaksanaan Salat Idulfitri di Tolikara.

Akibatnya, saat Salat Idulfitri yang dilaksanakan di lapangan Koramil, Distrik Karubaga mendapat serangan dari sejumlah pemuda GIDI. Salat Idulfitri kemudian dihentikan yang kemudian merembet pada kerusuhan massal yang efeknya terjadi pembakaran rumah-kios milik warga pendatang, jilatan api kemudian merembet dan membakar Masjid Al-Muttaqien. Kerusuhan tersebut membawa korban satu orang tewas serta tiga lainnya terluka. Ekses konflik tersebut sempat memantik respons yang menimbulkan gejolak dan riak kecil di daerah lain (Rosyid 2017). Konflik Tolikara berhasil dibatasi durasi dan eskalasinya dan akhirnya berhasil diatasi. Situasi KUB kembali kondusif, masjid yang ikut terbakar kini telah dibangun kembali dengan bangunan yang lebih besar dari sebelumnya.

Ketegangan bernuansa agama juga sempat terjadi beberapa kali di wilayah Kota Jayapura. Pada 25 Mei 2017 beredar isu pembakaran Alkitab oleh oknum TNI yang baru saja pindah tugas di Jayapura. Isu tersebut sempat memancing sejumlah massa untuk melakukan demonstrasi di sekitar wilayah Abepura. Suasana nyaris tidak terkendali akibat kemarahan massa namun tindakan cepat aparat, pemerintah dan tokoh masyarakat berhasil meredam ekses dari aksi massa tersebut, sehingga eskalasinya dapat dibatasi. Kasus lainnya yang memicu ketegangan harmoni KUB berkenaan dengan aktivitas kelompok Laskar Jihad pimpinan Jafar Umar Thalib (JUT) di daerah Muara Tami, Kota Jayapura pada Desember 2016 (Sabara dan Kodina 2020). Aktivitas kelompok Laskar Jihad yang semakin masif beberapa kali berujung konflik dengan warga sekitar yang

beragama Kristen. Rentetan kejadian tersebut menyebabkan terjadinya aksi massa yang menuntut pengusiran kelompok Laskar Jihad dari Papua.

Kondusivitas KUB di Papua dapat terjaga, meski beberapa kali terjadi ketegangan dan kerenggangan hubungan antar umat beragama. Kondisi ini disebabkan sinergitas berbagai elemen masyarakat termasuk tokoh agama. Peran tokoh NU cukup besar dalam kerja-kerja rekonsiliasi dan restorasi konflik. Penulis menyaksikan langsung bagaimana kerja-kerja rekonsiliasi dilakukan saat kasus Tolikara, Wamena dan Sentani. Peran tokoh NU baik di tingkat provinsi maupun tingkat lokal cukup besar memengaruhi jalannya proses rekonsiliasi dan restorasi.

Dalam kasus Idulfitri berdarah di Tolikara, misalnya, Ketua PWNU, Dr. Toni Wanggai beserta jajaran elit NU Papua dengan cepat melakukan koordinasi lintas sektoral melalui pendekatan struktur dan kultur. Toni Wanggai beserta beberapa tokoh NU aktif menghadiri pertemuan untuk memediasi penyelesaian konflik secara damai. PWNU menginisiasi dihadapkannya imam masjid di Tolikara yang juga tokoh NU setempat, yaitu Ali Mukhtar untuk datang ke Jayapura dan bertemu pemangku kepentingan guna membahas solusi rekonsiliasi konflik. Toni Wanggai bersama pengurus NU lainnya beserta Ali Mukhtar melakukan pertemuan rutin dengan perwakilan GIDI di Jayapura untuk mencari solusi melalui jalur *restorative justice*.

Menurut Toni Wanggai, jalur *restorative justice* ditempuh agar persoalan Tolikara dapat direkonsiliasi secara tuntas dan memuaskan semua pihak. Akhirnya pilihan *restorative justice* yang menjadi usulan NU diterima oleh semua pihak sebagai jalan keluar dalam menyelesaikan kasus konflik di Tolikara.

Akhirnya, 29 Juli 2015 menjadi tanggal bersejarah, yaitu ketika kedua belah pihak sepakat menandatangani perjanjian perdamaian dan toleransi. Tujuh poin disepakati; kedua belah pihak menyadari

perlunya saling memaafkan dengan tulus; setuju untuk membangun masjid baru; menyepakati penyelesaian masalah dengan menggunakan pendekatan budaya atau adat; sepakat untuk melakukan pemantauan rutin untuk toleransi dan pembangunan perdamaian di masa depan di wilayah tersebut. Singkatnya, poin-poin ini berakar pada hubungan damai selama bertahun-tahun antara kedua komunitas (Ridwan 2020). Terjadinya kesepakatan tersebut tak lepas dari inisiasi tokoh NU yang memainkan peran penting dengan mempertemukan para pemimpin dari kedua komunitas di kantor FKUB Papua, hasilnya konflik Tolikara dapat direkonsiliasi hanya 12 hari setelah peristiwa sekaligus disepakati restorasi pasca konflik di antara kedua belah pihak.

Kehadiran JUT beserta kelompok Laskar peran aktif NU melalui tokoh-tokohnya juga terlihat saat terjadi kasus penolakan pembangunan masjid agung di Wamena dan Sentani. Sebagaimana kasus Tolikara, tokoh NU Papua pro aktif melakukan konsolidasi guna memediasi dua belah pihak terkait kasus tersebut. Ketegangan yang terjadi di Wamena saat wacana penolakan pembangunan Masjid Agung Wamena seketika dapat diredam melalui peran aktif tokoh NU di Wamena, baik yang berasal dari OAP maupun pendatang. Pihak PWNU Papua aktif melakukan komunikasi dengan pemerintah setempat dan pihak gereja, sehingga penyelesaian kasus tersebut dapat berjalan dengan damai dan menemukan solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Demikian halnya saat kasus Masjid Agung Sentani, tokoh NU seperti Toni Wanggai dan Thaha Alhamid proaktif melakukan kerja-kerja mediasi dan rekonsiliasi. Secara intensif penulis menghadiri dan menyaksikan langsung beberapa pertemuan membahas solusi kasus tersebut. Toni Wanggai selaku Ketua PWNU Papua dan wakil Muslim Papua di MRP masuk dalam tim mediasi bersama unsur pemerintah, pihak PGGJ dan panitia pembangunan masjid. Tim mediasi akhirnya menemukan kata sepakat dan

berhasil merumuskan poin-poin perdamaian yang disahkan oleh bupati Kabupaten Jayapura. Setelah dirumuskannya poin-poin perdamaian tersebut, problematika pembangunan menara Masjid Agung Sentani pun dipandang telah selesai.

Jihad memicu masalah KUB tidak hanya dengan penganut Kristen namun juga internal Islam (Ridwan 2020). Peran NU cukup besar dalam menangani problem kehadiran Laskar jihad ini. Secara resmi NU menyatakan dengan tegas menolak kehadiran JUT bersama Laskar Jihad di Papua. NU mengeluarkan pernyataan, “Bagi umat Islam di Papua, pluralisme sebuah keharusan dan telah menjadi ketentuan Tuhan. Kami hidup dalam banyak agama pada satu keluarga besar. Rekam jejak JUT tidak mewakili Islam yang damai. Pemimpin Muslim di Papua telah berjuang untuk menunjukkan Islam yang damai. Kami khawatir kedatangan JUT akan mengganggu kerja-kerja kami untuk membangun Tanah Papua yang damai”. NU menjadi pihak yang proaktif untuk mencari solusi atas permasalahan kehadiran JUT di Papua. NU menginisiasi rapat dengan MUI dan pemerintah, baik pemerintah Kota Jayapura maupun pemerintah Provinsi Papua guna mencari solusi untuk masalah ini. NU kemudian mengeluarkan rekomendasi bahwa JUT harus keluar dari Tanah Papua, rekomendasi yang diterima oleh semua pihak. Walhasil berkat sikap tegas dan peran proaktif NU, keberadaan Laskar Jihad yang sempat nyaris memicu konflik antar agama berhasil diredam.

PENUTUP

Selaku agen Islam damai di Tanah Papua, NU mengedepankan pendekatan dialog guna memahami dan menjembatani perbedaan. NU Papua melalui tokoh-tokohnya aktif terlibat membangun dialogis dan kerjasama lintas elemen dan sektor mengenai persoalan keagamaan, budaya, ekonomi, politik serta berbagai persoalan lainnya yang dihadapi oleh masyarakat

Papua. Pendekatan dialog yang dilakukan ditujukan guna menyentuh hati dan pikiran orang Papua, sehingga dapat bersatu dalam visi dan tekad bersama untuk membangun Papua sebagai tanah damai. Modal sosial NU membangun pendekatan dan dialog dengan elemen masyarakat Papua tak lepas dari pengaruh citra Gus Dur yang cukup baik di mata masyarakat Papua. Figuritas Gus Dur membuat NU sangat mudah diterima oleh semua kalangan di Papua, sehingga sangat memuluskan kerja-kerja NU sebagai agen Islam damai.

Sebagai agen Islam damai, NU Papua aktif terlibat dalam menjaga, merawat dan menguatkan harmoni KUB di Papua, NU memainkan peran strategisnya selaku elemen ormas Islam yang menjadi pilar bagi harmoni KUB berdasarkan kearifan “tiga tungku satu batu”. Pendekatan sosio-kultur digunakan sebagai jalan membangun harmoni KUB tersebut, diantaranya dengan terlibat aktif dalam pengamanan Natal oleh Pemuda Anshor, aktif menjalin silaturahmi lintas iman terutama saat peringatan hari besar agama lain. Tokoh NU selalu diundang dalam peringatan Natal bersama dan diminta untuk memberikan sambutan pada acara tersebut. Pendekatan kebudayaan digunakan oleh tokoh NU di pegunungan, dalam merawat KUB, misalnya melalui media tradisi “Bakar Batu” yang dijadikan ajang silaturahmi antar sesama warga Papua yang berbeda agama.

Kerentanan konflik sosial di Papua akibat kompleksitas problematika sosial, ekonomi maupun politik, sesekali membawa isu agama sebagai narasi konflik. Beberapa kali isu agama terbawa dan menjadi konflik sosial bernuansa agama, meski tak selalu terwujud dalam manifes konflik, namun cukup mengganggu kelangsungan harmoni KUB di Papua. Sebagai ormas Islam terbesar, NU di Papua terlibat aktif dalam upaya mediasi, rekonsiliasi dan restorasi konflik bernuansa agama yang sempat beberapa kali terjadi. Dr. Toni Wanggai selaku Ketua PWNU Papua beserta jajarannya aktif terlibat dalam mediasi,

rekonsiliasi hingga restorasi konflik pada kasus “Idulfitri berdarah” di Tolikara (2015), penolakan pembangunan Masjid Agung Wamena (2016) dan menara Masjid Agung Sentani (2018, serta konflik yang diakibatkan oleh kedatangan Laskar Jihad pimpinan Jafar Umar Thalib. Berkat peran dan inisiasi NU, serangkaian konflik tersebut berhasil direkonsiliasi dan direstorasi dengan baik, sehingga harmoni KUB di Papua tetap terpelihara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Mohammad. 2012. “Agen dan Struktur dalam Pandangan Piere Bourdieu.” *BioKultur* 1 (2): 91–110.
- Afwan, Budi Asyhari. 2015. *Mutiara Terpendam Papua : Potensi Kearifan Lokal untuk Perdamaian Di Tanah Papua*. Yogyakarta: CRCS UGM.
- Aqil, Muhammad. 2020. “Nilai-Nilai Humanisme dalam Dialog Antar Agama Perspektif Gus Dur.” *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 1 (1): 52–66.
- Ashaf, Abdul Firman. 2006. “Pola Relasi Media, Negara, dan Masyarakat: Teori Strukturasi Anthony Giddens Sebagai Alternatif.” *Sosiohumaniora* 8 (2): 205–18.
- Barash, David. 2000. *Approaches to Peace a Reader in Peace Studies*. London: Oxford University Press.
- Barton, Greg. 2002. *Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President a View From the Inside*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Bilfagih, Taufik. 2016. “Islam Nusantara ; Strategi Kebudayaan NU di Tengah Tantangan Global.” *Jurnal Aqlam* 2 (1): 55–68. <http://journal.iain->
- Bräuchler, Birgit. 2015. *Reconciliation and the Revival of Tradition. The Cultural Dimension of Peace*. New York: Palgrave Macmillan.
- Dute, Hasruddin. 2021. “Kontribusi Masjid Jamiê NU Pada Perkembangan Islam di Papua.” *Tarbawi* 18 (2): 41–53.
- Giddens, Anthony. 2009. *Problematika Utama dalam Teori Sosial: Aksi, Struktur, Dan Kontradiksi dalam Analisis Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2010. *Teori Strukturasi: Dasar Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakim, Lukman, dan Eka Anjani. 2022. “Representation of Gus Dur’s Message of Peace About Papua in Mamat Alkatiri’s Stand Up Comedy.” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 33 (1): 35–56.
- Harpham, Trudy, Emma Grant, dan Elizabeth Thomas. 2002. “Measuring Social Capital within Health Surveys: Key Issues.” *Health Policy and Planning* 17 (1): 106–11.
- Hefner, Robert W. 2000. *Civil Islam, Muslim And Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press.
- Jaringan Damai Papua. 2013. *Indikator Papua Tanah Damai: Versi Masyarakat Papua Jaringan Damai Papua*. Jayapura: Jaringan Damai Papua (JDP).
- Jiharudin, dan Syaiful Mustofa. 2022. “Budaya Bakar Batu Sebagai Wujud Toleransi Masyarakat Papua.” *Tsaqofah* 20 (2): 89–100.
- Juditha, C. 2016. “Peace Journalism in News Tolikara Religion Conflict in Tempo.Co .” *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 20 (2): 93–110.
- Khaswara, Fajar, dan R Yuli Ahmad Hambali. 2021. “Conflict Theory According to Johan Galtung.” dalam *Gunung Djati Conference Series Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies*, 4:650–61. Bandung: Fakultas Ushuluddin, UI Sunan Gunung Djati.
- Marit, Elisabeth Lenny, dan Hugo Warami. 2018. “Wacana ‘Papua Tanah Damai’ Dalam Bingkai Otonomi Khusus Papua.” *Jurnal Ilmu Sosial FISIP Universitas Cenderawasih* 16 (1): 41–46.
- Menchik, Jeremy. 2014. “Productive

- Intolerance: Godly Nationalism in Indonesia.” *Comparative Studies in Society and History* 56 (3): 591–621.
- . 2016. *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mietzner, Marcus, and Burhanuddin Muhtadi. 2020. “The Myth of Pluralism: Nahdlatul Ulama and the Politics of Religious Tolerance in Indonesia.” *Contemporary Southeast Asia* 42 (1): 58–84.
- Munfaridah, Tuti. 2017. “Islam Nusantara Sebagai Manifestasi Nahdlatul Ulama (NU) dalam Mewujudkan Perdamaian.” *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 4 (1): 19–34.
- Nashir, Haedar. 2012. “Memahami Strukturasi dalam Perspektif Sosiologi Giddens.” *Sosiologi Reflektif* 7 (1): 1–9.
- Navarno-Castro, dan Nario-Galace. 2008. *Peace Education: A Pathways to a Culture of Peace*. Manila: Centre of Peace Education, Miriam College.
- Nurcholish, Ahmad. 2015. *Peace Education & Pendidikan Perdamaian Gus Dur*. Jakarta: Elex Media Kompetindo.
- Pamungkas, Cahyo. 2015. “The Contestation of Muslim and Special Autonomy in Papua.” *Religio* 5 (1): 26–49.
- . 2016. “Muslim Papua dan Muslim Pendatang Pertarungan Identitas Antara Ke-Indonesia-an dan Ke-Papua-An.” *Jurnal Kawistara* 6 (3): 249–64.
- . 2017. “The Campaign of Papua Peace Network for Papua Peace Land.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 21 (2): 147–59.
- Priyani, Anggun Putri. 2019. “Implementasi Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua.” *El-Iqtishady* 1 (2): 56–69.
- Ridwan. 2020. “The Role of Nahdlatul Ulama (NU) in Maintaining Religious Tolerance in Papua: Some Observations.” *Journal of Nahdlatul Ulama Studies* 1 (1): 17–33.
- Rosyid, Moh. 2017. “Peredam Konflik Agama: Studi Analisis Penyelesaian di Tolikara Papua 2015.” *Afkaruna* 13 (1): 48–81.
- Sabara. 2012. “Pola Pembinaan Muallaf di Kota Jayapura.” *Al-Qalam* 18 (2): 188–97.
- . 2018. “Split Nasionalisme Generasi Muda Papua di Kota Jayapura: Perspektif Teori Identitas.” *Jurnal Politik Profetik* 6 (1): 1–18.
- . 2019. “Transformasi Nasionalisme Dan Politik Identitas Orang Asli Papua.” dalam *Kekuasaan, Agama, & Identitas: Potret Gerakan Politik Lokal Di Indonesia Timur*, Wahyudin Halim (ed), 85–147. Yogyakarta: Lintas Nalar.
- Sabara, dan Elce Yohana Kodina. 2020. “Kerukunan Umat Beragama dalam Pikiran dan Praktik Kelompok Keagamaan Islam di Jayapura.” *Harmoni*.
- Saputra, Muhammad Ali. 2017. “Menguatnya Politik Identitas dan Problem Kerukunan Beragama di Manokwari.” *Mimikri* 3 (1): 15–27.
- Setiawan, Eko. 2017. “Konsep Teologi Pluralisme Gus Dur Dalam Meretas Keberagaman di Indonesia.” *Asketik* 1 (1): 57–68.
- Sims, Gregory K., Linden L. Nelson, and Mindi R. Puopolo. 2014. “Introduction to Personal Peacefulness: Psychological Perspectives.” dalam *Personal Peacefulness*. New York: Springer.
- Stepan, Alfred C. 2000. “Religion, Democracy, and the “Twin Tolerations”.” *Democracy John Hopkins University Press* 2 (4): 37–57.
- Sugandi, Yulia. 2008. *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*. Friedrich Ebert Stiftung.
- Suminar, Panji. 2020. “Relasi Agen dan Struktur: Ruang Negosiasi Dalam

- Pengelolaan Sumebrdaya Hutan Di Kabupaten Lebong.” *Jurnal Sosiologi Nusantara* 6 (1): 55–76.
- Syuhudi, Muh. Irfan. 2020. “Dinamika Kebangsaan Masyarakat Perbatasan Indonesia - Papua Nugini di Muara Tami Jayapura.” *Al-Qalam* 26 (2): 281–94.
- Waimbo, Danny Erlis, dan Prapto Yuwono. 2012. “Dinamika Masyarakat Papua pada Era Otonomi Khusus.” *Kritis* 21 (1): 20–34.
- Wally, John Manangsang. 2018. *Dunia dalam Genggaman Papua: Sebuah Fenomena Geo-Politik Global*. Jakarta: Yayasan Grafia Papua.
- Wanggai, Tony Victor. 2009. *Rekonstruksi Sejarah Umat Islam Di Tanah Papua*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Wonda, Sendius. 2007. *Tenggelamnya Ras Melanesia: Pertarungan Politik NKRI Di Papua Barat*. Yogyakarta: Galang Press.

JURNAL MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan
ISSN: 2476-320
E-ISSN: 2775-068X

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Kementerian Agama

PEDOMAN PENULISAN JURNAL MIMIKRI

- ▣ Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia dalam bidang kajian yang meliputi; Sosial, Agama dan Kebudayaan;
- ▣ Artikel ditulis dengan kaidah tata bahasa dan kosa kata bahasa Indonesia yang baku, baik, dan benar. Hindari penggunaan ungkapan lisan yang tidak sesuai dengan jalur bahasa ilmiah. Agar memfasilitasi para editor penulis diharapkan menggunakan *spelling check*.
- ▣ Artikel minimal 3500 kata dan tidak boleh melebihi 8000 kata.

A. Sistematika Penulisan

1. Judul
2. Nama penulis, lembaga penulis, alamat lembaga, dan email
3. Abstrak
4. Kata kunci
5. Pendahuluan (latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajianpustaka, literatur review (tulisan terkait)
6. Metodologi
7. Pembahasan (temuan dan analisis)
8. Penutup
9. Ucapan terima kasih
10. Daftar Pustaka menggunakan aplikasi Mendeley atau Zatero
11. Lampiran (jika ada)

B. Ketentuan Penulisan

1. Judul
 - Judul ditulis dengan huruf kapital semua dibagian tengah atas pada halaman pertama
 - Judul harus ringkas (6-9 kata). Hindari menggunakan kata seperti analisis, studi, kajian, penelitian, pengaruh, dan lain sebagainya.

- Judul mencerminkan isi artikel. Jangan menggunakan judul yang sulit dipahami;
 - Judul menggunakan (Bahasa Indonesia)
2. Nama penulis, lembaga penulis, alamat lembaga, dan email
 - Nama lengkap penulis (tanpa gelar akademik), alamat lembaga, dan alamat email penulis yang tertulis di bawah judul.
 - Penulis yang lebih dari satu orang, menggunakan kata penghubung “dan” bukan “&”.
 3. Abstrak
 - Abstrak ditulis satu paragraf sebelum isi naskah.
 - Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia.
 - Abstrak mencakup esensi utuh penelitian, metode dan pentingnya temuan, dan saran atau kontribusi tulisan;
 - Abstrak Bahasa Indonesia maksimal 250 kata
 4. Kata kunci
 - Kata kunci Bahasa Indonesia (4-5 kata)
 - Kata kunci (keywords) ditulis dengan huruf tebal (*bold* dan *italic*)
 5. Pendahuluan
 - Memuat latar belakang, urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka (tulisan terkait).
 - Hindari menggunakan singkatan seperti dll, dst. krn. dsb. dan lain sebagainya.
 - Singkatan institusi dan lain sebagainya hendaknya ditulis lengkap pada pertama munculnya.
 - Jangan menggunakan huruf tebal, huruf yang digarisbawahi, atau huruf dengan tanda yang lain.
 - Kata dalam bahasa lain daripada bahasa yang digunakan dalam artikel dimiringkan.
 - Jangan miringkan kata yang ingin dititikberatkan. Kata yang dititikberatkan ditandai dengan tanda kutipan (“) sebelum dan setelah kata atau ungkapan yang ingin dititikberatkan.
 - Kutipan harus jelas di mana awal dan akhirnya. Kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda kutipan tunggal (,). Kutipan dalam kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda kutipan rangkap (“”).
 - Penulisan acuan menggunakan *innote*, contoh Arifuddin Ismail (2014:88) atau (Arifuddin Ismail, 2014: 99).
 6. Metodologi
 - Memuat berbagai teknik dan strategi yang digunakan dalam penulisan artikel

7. Pembahasan

- Merupakan inti dari pembahasan yang berusaha menjawab rumusan masalah penelitian yang diangkat dan dianalisis secara deskripsi dan intepretasi data-data. Pembahasan dilakukan secara mendalam yang didasarkan pada teori-teori yang digunakan.
- Untuk tabel dan gambar (grafik) sebagai lampiran dicantumkan pada halaman sesudah teks. Sedangkan tabel atau gambar, baik di dalam naskah maupun bukan harus diberi nomor urut.
- Tabel atau gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar.
- Sumber acuan tabel atau gambar dicantumkan di bawah tabel atau gambar.
- Garis tabel yang dimunculkan hanya pada bagian *header* dan garis bagian paling bawah tabel sedangkan untuk garis vertikal pemisah kolom tidak dimunculkan.
- Tabel atau gambar bisa diedit dan dalam tampilan berwarna yang representatif.
- Ukuran resolusi gambar minimal 300 dpi.

Contoh Penyajian Tabel:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Total	Pemeluk Agama				
			Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha
1	Balikpapan Barat	88,288	83,030	2,549	777	96	1,836
2	Balikpapan Utara	120,265	109,710	7,376	2,046	350	783
3	Balikpapan Timur	63,653	59,419	3,423	669	61	81
4	Balikpapan Tengah	108,513	93,942	11,164	1,716	243	1,448
5	Balikpapan Selatan	215,265	186,212	20,417	5,070	923	2,634
	Jumlah	595,975	532,313	44,929	10,278	1,673	6,782

Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2011

Contoh Penyajian Gambar:

Gambar 1. Masjid Shital Mustaqiem



Sumber: Dokumen Masjid Shital Muataqiem Samarinda, 2012

8. Penutup

Memuat kesimpulan dari pembahasan penelitian yang telah dilakukan

9. Ucapan terima kasih

Ucapan terima kasih berisi wujud penghargaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan penyusunan artikel yang ditujukan kepada siapa saja yang patut diberikan ucapan terima kasih, baik secara lembaga/institusi, pemberi donor ataupun individu.

10. Daftar Pustaka

Daftar rujukan yang digunakan dalam penulisan artikel minimal 15 (buku, jurnal nasional dan International). Hindari rujukan dari internet yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Daftar rujukan ditulis sebagai berikut:

- Nama penulis: nama keluarga dahulu disusul dengan nama pribadi. Kalau tidak ada nama keluarga, nama ditulis seadanya.
- Tahun terbitan
- Judul: judul buku ditulis dengan huruf miring. Judul artikel ditulis di antara tanda kutip („,“) disusul dengan koma dan tidak memakai huruf miring. Jurnal atau majalah atau buku dari mana artikel dirujuk ditulis dengan huruf miring.
- Informasi tentang tempat dan nama penerbit.
- Setiap rujukan berakhir dengan titik (.).
- Menggunakan aplikasi Mendeley atau Zatero

Contoh buku:

Wahid, Abdurrahman. 2006. *Islamku Islam Anda Islam Kita. Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute.

Contoh artikel:

Budiman, Manneke. 2011. „Ethnicity and the performance of identity“, Wacana 13/2.
Ricklefs, M.C. 2008. „Religion, Politics and Social Dynamics in Java: Historical and Contemporary Rhymes“, dalam: Greg Fealy dan Sally White (eds) *Expressing Islam. Religious Life and Politics in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

C. Pengiriman Artikel

- Artikel dikirimkan sebanyak 2 rangkap dan *softcopy* berupa file. File bisadikirim melalui link OJS [:Mimikri](#).
- Artikel yang dikirim **wajib** dilampiri biodata ringkas dan surat pernyataan keaslian tulisan.
- Penulis yang menyerahkan artikelnya harus menjamin bahwa naskah yang diajukan tidak melanggar hak cipta, belum dipublikasikan atau telah diterima untuk dipublikasi oleh jurnal lainnya.
- Kepastian naskah dimuat atau tidak, akan diberitahukan secara tertulis. Artikel yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan.

Alamat Jurnal Mimikri:

**Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Kementerian Agama**

Jalan A.P.Pettarani No.72 Makassar

Kontak Pimpinan Redaksi

Nasrun Karami Alboneh : 081355661118/ Nur Saripati Risca: 081244164526

E-mail: mimikrijurnal@gmail.com

Makassar, 17 Januari 2022
Pemimpin Redaksi

Nasrun Karami Alboneh